

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal oleh konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, yang secara eksplisit mengamankan tugas pokok negara adalah “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Ini mempunyai arti, pemerintah sebagai penyelenggara negara menjamin hak asasi setiap warga negara untuk memiliki kehidupan yang layak dan tugas pemerintah untuk menjamin terwujudnya hal itu. Pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki hampir 14.000 pulau dengan 930 pulau dengan luas wilayah 1,9 juta kilometer persegi dan penduduk dengan aneka ragam etnik. Pada tahun 1990 jumlah penduduk Indonesia berjumlah 170 juta jiwa dan tahun 2009 meningkat menjadi 231 juta jiwa memiliki karakteristik pembangunan dan strateginya sendiri.

Pada masa orde baru, pemerintahan Indonesia telah menjadikan paradigma pembangunan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan dari seluruh kebijakan pemerintahan. GBHN dan Repelita sebagai instrumen utama dari penyelenggaraan pemerintahan saat itu. Pemerintah mengambil peran sentral dalam pembangunan

nasional. Semua kebijakan, tata kelola, sampai pada pelaksanaan jalannya negara dikelola oleh pemerintah pusat, sehingga pada masa itu Indonesia dikenal menjalankan sentralisasi pemerintahan atau pemerintahan yang terpusat.

Perencanaan dan pengendalian terpusat ini mengharuskan adanya penyeragaman sistem pemerintah daerah dan manajemen proyek yang dikembangkan di daerah, tujuannya ialah agar hasil mudah diukur, dikendalikan, diawasi dan dievaluasi. Akibat dari sentralisasi ini adalah semakin kuatnya ketergantungan daerah kepada pusat. Sementara hasil-hasil pembangunan lebih terkonsentrasi di pusat pemerintahan (pulau Jawa), sehingga pulau Jawa menjadi lebih maju dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, yang pada akhirnya timbul ketimpangan struktur ekonomi yang mencolok antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa.

Daerah yang relatif kaya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sehingga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Hal ini sangat jauh berbeda dengan daerah-daerah yang relatif miskin khususnya kawasan timur Indonesia. Walaupun tingkat kemiskinan nasional menurun dari 23,43 persen (1999) menjadi 14,15 persen (2009) dan jika dilihat lebih jauh tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Indonesia juga mengalami penurunan, kabupaten/kota yang relatif kaya menerima manfaat yang lebih besar dari program pemulihan ekonomi. Kabupaten/kota yang relatif lebih kaya dapat menurunkan tingkat kemiskinan sampai dengan setengah dari tingkat sebelumnya. Namun

kabupaten/kota yang relatif lebih miskin tingkat kemiskinan hanya turun sekitar seperempatnya.¹

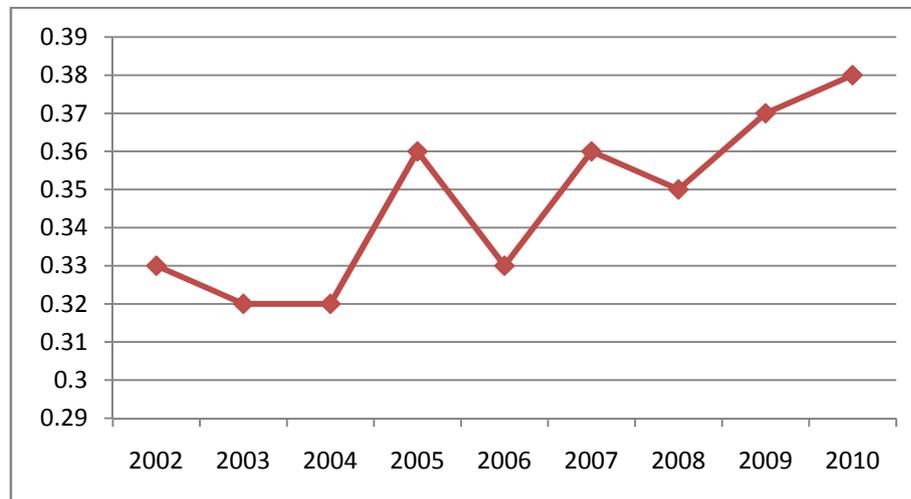
Akibatnya ketimpangan pendapatan antara kabupaten/kota yang relatif kaya dengan yang relatif lebih miskin menjadi semakin besar. Kabupaten/kota yang relatif kaya tumbuh di atas angka rata-rata nasional sebesar 5,63 persen (2008), sementara tingkat pertumbuhan di kabupaten/kota yang relatif miskin berada di bawah angka rata-rata nasional 5,39 persen (2008) dengan pertumbuhan nasional 5,59 persen.² Tingkat kemiskinan masih lebih tinggi pada wilayah-wilayah yang bergantung pada sektor pertanian, karena sektor manufaktur dan jasa tumbuh melampaui sektor pertanian, pendidikan, kesehatan dan fasilitas fisik di sejumlah kota besar di Indonesia jauh lebih baik bila dibandingkan dengan kota-kota lainnya, khususnya kawasan timur Indonesia.

Selain dapat dilihat dari pembangunan yang hanya terpusat di Jawa. Ketimpangan pendapatan juga dapat diwakilkan dengan indeks gini. Indeks ini dapat menjadi alat deteksi atau semacam *proxy* pemerataan/ketimpangan distribusi pendapatan sebuah masyarakat. Nilainya selalu positif dan tidak akan lebih besar dari 1. Makin mendekati satu, makin tidak merata distribusi pendapatan yang terjadi. Indeks gini juga digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pada masing-masing wilayah.

¹ Badan Pusat Statistik, *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Distribusi Pendapatan*, p.11

² *ibid*

Gambar 1.1
Koefesien Gini Atas Dasar Provinsi di Indonesia
Tahun 2002 – 2010



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar diatas, pertumbuhan Indeks Gini Indonesia dari tahun 2002-2010 berturut-turut (%) adalah 0.33; 0.32; 0.32; 0.36; 0.33; 0.36; 0.35; 0.37; dan 0.38 seperti yang digambarkan pada tabel di atas. Hal ini menunjukkan pada periode tahun 2002-2004 terjadi penurunan ketimpangan antara kaum miskin dan kaya, namun terjadi kenaikan sebesar 4% pada tahun 2005, dan kemudian terjadi fluktuasi antara periode 2006-2008. Namun sangat disayangkan pada dua tahun berikutnya, ketimpangan di Indonesia terus menerus mengalami kenaikan, seperti yang terlihat pada tahun di atas dalam kurun waktu 2009-2010. Dari gambar di atas tercermin bahwa walaupun masih dalam kisaran ketimpangan sedang, namun telah terjadi peningkatan ketidakmerataan dalam pembangunan.

Faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan salah satunya adalah tingkat pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting bagi pembangunan. Di negara maju, perhatian pemerintahnya terhadap pembangunan sektor pendidikan

sangat besar, misalnya komitmen politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan secara nyata akan mendorong kemajuan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial.

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, mutu pendidikan di Indonesia masih rendah, seperti dilaporkan Human Development Index (HDI). Laporan HDI tahun 2003 menunjukkan, Indonesia pada urutan ke-112 (0,682) dari 175 negara. Posisi ini jauh di bawah Singapura yang ada di posisi ke-28 [0,888), Brunei Darussalam ke-31 (0,872), Malaysia ke-58 (0,790), Thailand ke-74 (0,768), dan Filipina ke-85 (0,751).³ Meski laporan HDI bukan hanya mengukur status pendidikan (tetapi juga ekonomi dan kesehatan), namun ia merupakan dokumen rujukan yang valid guna melihat tingkat kemajuan pembangunan pendidikan di suatu negara.

Dalam kenyataannya, sekarang ini masih ada banyak siswa miskin tidak dapat menikmati pendidikan dasar. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Fasli Jalal, masih ada belasan juta anak usia sekolah yang tidak terlayani pendidikannya. Masih ada 1.422.141 anak di usia 7-12 tahun, 5.801.122 pada usia 13-15 tahun, dan 911.394 anak di usia 16-18 yang tidak dilayani pendidikannya.⁴ Inilah yang kiranya perlu diperhatikan oleh pemerintah dan juga wakil rakyat yang memenangi pemilihan umum (pemilu), bagaimana mereka dapat bersekolah.

Kenyataan diatas menunjukkan pemerataan pendidikan yang bermutu dan terjangkau khususnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi masih perlu

³ Didin Saripudin, Makalah Pembangunan Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia , (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2008), p. 7

⁴ *Ibid*, p.8

dipertanyakan. Banyak sekolah atau perguruan tinggi yang bermutu, baik negeri maupun swasta dipadati oleh anak-anak dari golongan ekonomi atas. Kenyataan, setiap tahun ajaran baru tiba permasalahan lama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu yang umumnya menghantui pikiran kebanyakan orang tua, khususnya orang tua yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Keterbatasan daya tampung pendidikan yang diselenggarakan pemerintah membuat persaingan semakin ketat sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadi praktek di luar norma yang telah ditentukan.

Selain pendidikan yang dijadikan sebagai investasi modal manusia yang penting bagi pembangunan, investasi seringkali menjadi primadona bagi daerah yang membutuhkan suntikan dana bagi pembangunan daerahnya. Berikut adalah perbandingan nilai investasi dalam negeri dan investasi asing yang masuk ke Indonesia tahun 2009 – 2010.

Tabel 1.1
Perkembangan Realisasi Investasi di Indonesia per Pulau Besar di Indonesia Tahun 2009-2010 (Miliar Rp)

Lokasi	2009				2010			
	PMDN		PMA		PMDN		PMA	
	P	I	P	I	P	I	P	I
Sumatera	39	7,819.6	123	776.2	222	4,224.2	362	747.1
Jawa	174	25,766.5	946	9,370.6	397	35,140.3	1,976	11,498.8
Kalimantan	22	2,934.4	31	284.4	149	14,575.6	253	2,011.4
Sulawesi	7	1,187.4	16	141.6	58	4,337.6	81	859.1
Bali dan Nusa Tenggara	5	50.8	100	233.8	39	2,119.3	374	502.7
Maluku	-	-	2	5.9	2	-	8	248.9
Papua	1	41.0	3	2.8	8	229.3	27	346.8
Total	248	37,799.8	1,221	10,815.2	875	60,626.3	3,081	16,214.8

Sumber: BKPM

Dari tabel nilai investasi yang masuk di atas dapat dilihat bahwa masih terjadi prioritas pembangunan yang berada di kawasan indonesia bagian barat,

khususnya pulau jawa. Total proyek dan nilai investasi yang masuk di Pulau Jawa dua tahun berturut-turut 2009 – 2010 mengalami peningkatan yang signifikan. Investasi asing yang masuk tahun 2009 sejumlah 946 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 9,370.6 M dan pada tahun 2010 meningkat dengan proyek yang berjumlah 1,976 proyek dan Rp 11,498.8 M. Jika dibandingkan dengan Pulau Kalimantan misalnya pada tahun 2009 jumlah proyek asing yang masuk ke Pulau Kalimantan berjumlah 31 proyek dengan investasi sebesar Rp 284.4 M. Sedangkan tahun 2010 total investasi yang masuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan walau belum sebesar Jawa dengan jumlah proyek 253 buah dan total investasi senilai Rp 2,011.4 M.

Dari ulasan diatas dapat dilihat jelas bahwa selama periode 2009-2010 Jawa merupakan wilayah yang memiliki nilai PMA dan PMDN yang terealisasi dan memiliki pangsa terhadap total investasi langsung paling tinggi. Wilayah lainnya seperti Sumatera dan Kalimantan yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah mendapat alokasi yang cukup memadai. Sedangkan untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua terlihat jelas bahwa masih minimnya investasi yang masuk ke wilayah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa proses pembangunan ekonomi berjalan relatif lebih lambat dibandingkan wilayah lain. Dan juga belum ada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Keputusan Presiden yang secara tegas pembagian nilai investasi yang masuk ke wilayah Indonesia. Hanya ada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1994 Pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Kegiatan usaha perusahaan dalam rangka penanaman modal asing dapat berlokasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Bagi daerah yang telah ada Kawasan Berikat atau Kawasan Industri, lokasi kegiatan perusahaan tersebut diutamakan di dalam kawasan tersebut.

Hal ini sangat disayangkan, dengan kurangnya campur tangan pemerintah dalam menentukan alokasi investasi yang masuk ke suatu wilayah tertentu, dapat terjadi ketimpangan pembangunan yang terus berlanjut.

Jika diteliti secara mendalam, banyak hal yang menyebabkan ketimpangan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan menurut Anneli Kaasa dalam jurnal yang berjudul *Factors of Income Inequality and Their Influence Mechanisms: A Theoretical Overview*, membagi ke dalam lima kelompok faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan, yaitu pertama faktor ekonomi pembangunan yang terdiri dari kesejahteraan negara, struktur pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pembangunan teknologi. Kedua faktor demografi yang terdiri dari urbanisasi, komposisi rumah tangga, tingkat pendidikan, ketimpangan pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan. Ketiga faktor politik yaitu demokrasi dan bagian sektor pemerintah. Keempat faktor lingkungan dan budaya yang terdiri dari konsentrasi tanah, variasi budaya, bayangan ekonomi, korupsi, eksplorasi sumber daya alam. Serta faktor yang kelima yaitu faktor makro ekonomi yang terdiri dari inflasi, pengangguran, keuangan pembangunan, ekspor-impor dan investasi asing.

Dari semua faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dua faktor penting, yaitu tingkat pendidikan dan investasi asing (*Foreign Direct Investment*).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah tersebut, maka dikemukakan identifikasi masalah yang dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pembangunan teknologi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan?
3. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan?
4. Apakah terdapat pengaruh antara urbanisasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan?
5. Apakah terdapat pengaruh antara investasi asing terhadap ketimpangan distribusi pendapatan?
6. Apakah terdapat pengaruh korupsi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat kompleksnya masalah yang timbul dan hal ini tidak memungkinkan bagi peneliti untuk membahas semua masalah di dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada masalah “Pengaruh tingkat pendidikan dan *foreign direct investment* terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.”

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, peneliti merumuskan permasalahan di dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah terdapat pengaruh Tingkat Pendidikan dan *Foreign Direct Investment* terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan?”

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi dan khasanah ilmu tentang tingkat pendidikan dan *foreign direct investment* serta pengaruhnya terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sehingga penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan, masukan, serta referensi bagi penelitian selanjutnya dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi terhadap tingkat pendidikan dan *foreign direct investment* kaitannya terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.